

**MATRIKS PERMASALAHAN
KOMISI III BIDANG PENGAWASAN LLAJ
RAKORNIS PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018
JAKARTA, 14 - 15 MARET 2018**

Pimpinan Sidang : Ahmad Yani, ATD, M.T. (Direktur Pembinaan Keselamatan)
Ketua Komisi III : Amran, S.E., M.M. (Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat)

Kesimpulan Hasil Sidang Komisi III Bidang Pengawasan LLAJ adalah sebagai berikut:

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Perlengkapan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya tim pengawasan perlengkapan jalan; b. Sumber Daya Manusia bidang pengawasan perlengkapan jalan masih minim; c. Belum adanya sistem dan SOP Pengawasan Perlengkapan Jalan termasuk dalam keadaan darurat; d. Belum adanya anggaran pengawasan perlengkapan jalan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. BPTD segera membentuk tim pengawasan perlengkapan jalan nasional yang melibatkan Dishub Propinsi dan Dishub Kab/Kota. b. Pembinaan SDM bidang pengawasan perlengkapan jalan; c. Menyusun sistem dan SOP pengawasan perlengkapan jalan yang terdiri dari inventarisasi permasalahan sampai dengan tindaklanjut penyelesaian permasalahan. d. Menyusun formulasi pembiayaan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Segera membentuk tim pengawasan perlengkapan jalan Propinsi yang melibatkan Dishub Kab/Kota dan diikutsertakan dalam tim pengawasan Jalan Nasional b. Menyediakan SDM di bidang pengawasan perlengkapan jalan c. Melaksanakan sistem dan pedoman SOP Pengawasan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi; d. Menyusun formulasi pembiayaan pengawasan perlengkapan jalan sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Segera membentuk tim pengawasan perlengkapan jalan Kabupaten dan Kota dan diikutsertakan dalam tim pengawasan Jalan Nasional dan Jalan Propinsi; b. Menyediakan SDM di bidang pengawasan perlengkapan jalan c. Melaksanakan sistem dan pedoman SOP Pengawasan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten dan Kota; d. Menyusun formulasi pembiayaan pengawasan perlengkapan jalan

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
			perlengkapan jalan sesuai kewenangannya		sesuai kewenangannya

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
2	Pengujian Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya tim pengawasan PKB; b. Sumber Daya Manusia bidang pengawasan PKB masih minim; c. Belum adanya sistem dan SOP Pengawasan PKB termasuk dalam keadaan darurat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk tim pengawasan PKB; b. Melakukan pembinaan terhadap SDM Pengujian Kendaraan Bermotor; c. Menyusun dan mensosialisasikan sistem dan SOP pengawasan PKB yang terdiri dari inventarisasi permasalahan sampai dengan tindak lanjut penyelesaian permasalahan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Diikutsertakan dan koordinasi pada tim pengawasan PKB; b. Menyediakan SDM pengawasan PKB; c. Melaksanakan sistem dan SOP Pengawasan PKB 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan pelaksanaan PKB; b. Menyediakan SDM Pengawasan PKB; c. Melaksanakan sistem dan SOP Pengawasan PKB

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
3	Terminal	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Daya Manusia bidang pengawasan terminal masih minim; b. Belum adanya SOP Pengawasan terminal; c. Belum adanya mekanisme koordinasi/fasilitasi permasalahan bidang pengawasan terminal; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap SDM Bidang pengawasan terminal sesuai kewenangan; b. Menyusun SOP pengawasan terminal sesuai kewenangan; c. Menyusun mekanisme koordinasi untuk memfasilitasi permasalahan pengawasan terminal; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap SDM Bidang pengawasan terminal sesuai kewenangan; b. Menyusun SOP pengawasan terminal sesuai kewenangan; c. Berperan aktif dalam koordinasi penyampaian permasalahan pengawasan terminal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap SDM Bidang pengawasan terminal sesuai kewenangan; b. Menyusun SOP pengawasan terminal sesuai kewenangan; c. Berperan aktif dalam koordinasi penyampaian permasalahan pengawasan terminal

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
4.	UPPKB	a. SDM pengawasan pada UPPKB masih minim; b. Prosedur pengawasan di UPPKB belum ada	a. Pemenuhan SDM Pengawasan UPPKB b. Penyusunan SOP pengawasan UPPKB;	Mendukung pelaksanaan pengawasan UPPKB	Mendukung pelaksanaan pengawasan UPPKB

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
5.	Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM di daerah belum siap b. Belum adanya pemahaman yang mendalam terkait SMK. c. Belum adanya prosedur terkait SMK 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan SDM pengawasan di bidang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (AKAP) b. Sosialisasi SMK terhadap Perusahaan Angkutan Umum (AKAP) c. Menyusun SOP terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan pembinaan SDM pengawasan di bidang SMK Perusahaan Angkutan Umum (AKDP) b. Sosialisasi SMK terhadap Perusahaan Angkutan Umum (AKDP) c. Melaksanakan SOP terkait SMK sesuai kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan pembinaan SDM pengawasan di bidang SMK Perusahaan Angkutan Umum (Angkot dan Angkutan Perdesaan) b. Sosialisasi SMK terhadap Perusahaan Angkutan Umum (Angkot dan Angkutan Perdesaan) c. Melaksanakan SOP terkait SMK sesuai kewenangan

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
6.	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dioperasikan tidak memiliki perlengkapan keselamatan; b. Usia sarana kapal yang dioperasikan sudah tua c. SDM yang mengoperasikan masih belum berkompeten 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan rampcheck pemeriksaan Kapal Sungai dan Danau dan untuk penyeberangan berkoordinasi dengan Perhubungan Laut b. Melakukan uji petik terkait usia kapal c. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap SDM yang mengoperasikan sekaligus pembinaan di lapangan sesuai kewenangannya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ikut serta dalam rampcheck pemeriksaan Kapal Sungai dan danau b. Melakukan uji petik terkait usia kapal sesuai kewenangannya c. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap SDM yang mengoperasikan sekaligus pembinaan di lapangan sesuai kewenangannya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ikut serta dalam rampcheck pemeriksaan Kapal Sungai dan danau b. Melakukan uji petik terkait usia kapal sesuai kewenangannya c. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap SDM yang mengoperasikan sekaligus pembinaan di lapangan sesuai kewenangannya;

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
7.	Angkutan umum (AKAP, AKDP, Angkot dan Angkutan Perdesaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Angkutan Umum yang dioperasikan tidak memenuhi Persyaratan Laik Jalan dan Pemalsuan Izin Trayek; b. Adanya SOP Pemeriksaan Angkutan umum (ramp check) belum terpedomani secara maksimal c. Kurangnya SDM PPNS LLAJ d. Koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan angkutan umum (Ramp Check) di Terminal Tipe A dan Uji Petik di Jalan Nasional b. Melakukan sosialisasi melalui bimbingan teknis pelaksanaan SOP Pemeriksaan Angkutan Umum (Ramp Check) c. Melakukan pembinaan PPNS LLAJ d. Memperkuat koordinasi antar instansi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan angkutan umum (Ramp Check) di Terminal Tipe B dan Uji Petik di Jalan Provinsi b. Melaksanakan dan memedomani SOP Pemeriksaan Angkutan Umum c. Menyediakan SDM untuk PPNS LLAJ d. Memperkuat koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan angkutan umum (Ramp Check) di Terminal Tipe C dan Uji Petik di Jalan Kab/Kota b. Melaksanakan dan memedomani SOP Pemeriksaan Angkutan Umum c. Menyediakan SDM untuk PPNS LLAJ d. Memperkuat koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal

No.	Substansi	Permasalahan Bidang Pengawasan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
8.	Angkutan Parisiwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Angkutan Pariwisata yang dioperasikan tidak memenuhi Persyaratan Laik Jalan dan Pemalsuan Izin Trayek; b. Adanya SOP Pemeriksaan Angkutan Pariwisata (ramp check) belum terpedomani secara maksimal c. Kurangnya SDM PPNS LLAJ d. Koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan angkutan pariwisata (Ramp Check) di lokasi pariwisata dan Uji Petik di Jalan Nasional b. Melakukan sosialisasi melalui bimbingan teknis pelaksanaan SOP Pemeriksaan Angkutan pariwisata (Ramp Check) c. Melakukan pembinaan PPNS LLAJ d. Memperkuat koordinasi antar instansi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan angkutan Pariwisata (Ramp Check) di lokasi pariwisata dan Uji Petik di Jalan Provinsi b. Melaksanakan dan memedomani SOP Pemeriksaan Angkutan pariwisata c. Menyediakan SDM untuk PPNS LLAJ d. Memperkuat koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan angkutan pariwisata (Ramp Check) di lokasi pariwisata dan Uji Petik di Jalan Kab/Kota b. Melaksanakan dan memedomani SOP Pemeriksaan Angkutan pariwisata c. Menyediakan SDM untuk PPNS LLAJ d. Memperkuat koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal